

STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Dida Catur Hidayat¹, Dini Yuliani², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: dida.catur@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam Pengembangan Kepariwisata belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Strategi Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Dibuktikan dengan adanya indikator yang belum optimal diantaranya dengan ditemukannya hambatan-hambatan antara lain: dalam bekerjasama dengan instansi lain terkadang lama dalam proses pengkajian sehingga menyita waktu dalam proses administrasinya, fasilitas yang dibangun pemerintah belum bisa di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, selanjutnya pemerintah dinas pariwisata masih kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan calon investor, fasilitas yang dibangun oleh pemerintah belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memberikan jangka waktu untuk proses pengkajian dari instansi lain, berupaya melakukan penawaran untuk para investor, berupaya bernegosiasi dengan masyarakat sekitar agar bisa memanfaatkan fasilitas untuk berjualan

Kata Kunci: *Strategi, Pengembangan, Pariwisata*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang memiliki berbagai potensi yang besar hampir di segala sektor, salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata dianggap menjadi bagian dari sektor ekonomi penting bagi negara, dimana pariwisata secara langsung memberikan kontribusi. Pariwisata dapat dijadikan sebagai penghasil devisa, dan menjadi salah satu sektor utama yaitu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian negara. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor industri potensial yang menjadi pilar ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai penghasil devisa dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal, dengan potensi daerah yang di sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut, harusnya dapat mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada

Keberhasilan suatu obyek wisata untuk menarik kunjungan wisatawan merupakan salah satu bukti kemampuan pihak manajemen dalam mengembangkan segala macam, aktivitas yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pemberian layanan yang baik bagi wisatawan. Untuk itu strategi pengembangan untuk membuat konsep wisata sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan dan tertarik dengan obyek wisata.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat Pangandaran merupakan salah satu kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini mejadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Pangandaran merupakan salah satu tempat wisata pantai yang terkenal yang ada di Jawa Barat. Daya tarik wisata pantai Pangandaran tidak hanya dikenal oleh wisatawan domestik tetapi juga dikenal oleh wisatawan mancanegara. Sebagai daerah tujuan wisata, Pangandaran menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan. Pariwisata telah menjadi salah satu industri yang mampu memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran adalah salah satu tempat wisata yang tidak hanya terkenal dengan keindahan pantainya tetapi terkenal dengan banyak objek wisata lainnya seperti Batu Hiu, Batukaras, Karapyak dan masih banyak lainnya.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 Kabupaten Pangandaran telah memiliki kurang lebih tujuh belas destinasi wisata yang beberapa dinataranya merupakan objek wisata yang baru terekspos dan ini menunjukan salah satu bukti pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Namun saat ini yang resmi dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran hanya berjumlah 5 (lima) objek wisata saja, diantaranya adalah: Objek wisata Pangandaran, Objek wisata Batu Hiu, Objek wisata Green Canyon, Objek wisata Batukaras, Objek wisata Karapyak, dan siasnya dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai strategi pengembangan kepariwisataan pada dasarnya menekankan pentingnya perencanaan yang terarah untuk mengoptimalkan potensi wisata suatu daerah. Literatur tentang manajemen destinasi wisata menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan aspek daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, serta promosi yang efektif. Konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan juga menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, serta kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi yang tepat dapat meningkatkan daya saing destinasi, memperkuat identitas lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

Dalam konteks Kabupaten Pangandaran, kajian pustaka menunjukkan bahwa daerah ini memiliki keunggulan komparatif berupa potensi wisata alam seperti pantai, cagar alam, geowisata, dan ekowisata yang memerlukan strategi pengelolaan terpadu. Literatur terkait pengembangan pariwisata daerah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM pariwisata, diversifikasi atraksi wisata, dan digitalisasi promosi merupakan faktor yang sering disebut sebagai kunci keberhasilan pembangunan destinasi wisata. Dengan demikian, kajian pustaka menempatkan strategi pengembangan kepariwisataan Pangandaran sebagai langkah yang memadukan penguatan potensi lokal, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pariwisata yang berkelanjutan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Sukmandinata, (2011:21) menyatakan bahwa: Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuat, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara danm observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi sebelum digunakan (ditampilkan) telah diproses melalui pencataan, mengelompokan/menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan, sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran sebagaimana teori diatas, maka penulis melakukan kegiatan wawancara kepada informan sebanyak 5 (lima) orang. Berdasarkan teori tersebut maka selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan wawancara kepada informan dalam penelitian yang hasilnya sebagai berikut:

1. *Purposesi* (Tujuan)

Purposes (Tujuan) peneliti mengambil teori yang dikemukakan Mulgan, konsep tujuan yang merupakan konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. Dimana indikator *purposes* atau tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) indikator, pertama adanya tujuan pembangunan pariwisata di dalam peraturan perundan-undangan, kedua adanya kerjasama dengan instansi lain untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk lebih lanjut setiap indikator akan diuraikan sebagai berikut :

a. Adanya tujuan pembangunan pariwisata di dalam peraturan perundan-undangan

Dari hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan pembangunan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA), dalam Perda tersebut terdapat 4 (empat) tujuan pembangunan kepariwisataan, pertama pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata. Adapun hasil observasi dilapangan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah memiliki tujuan pembangunan pariwisata dan tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA).

Dari hasil studi dokumentasi dapat digambarkan bahwa Dinas Pariwisata berperan sebagai pelaksana kebijakan bidang pariwisata mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah memiliki tujuan untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangadaran Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA).

b. Adanya kerjasama dengan instansi lain untuk mencapai tujuan pembangunan

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pangadaran bekerja sama dengan Dinas PUPR, DLHK, Dishub, dan pemerintah desa dalam program pengembangan obyek wisata. Adapun hasil observasi lapangan dapat dilihat bahwa dalam pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Pangadaran terdapat pekerjaan yang bersumber dari anggaran selain Dinas Pariwisata, seperti pemasangan penerangan, pemasangan rambu-rambu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Pangadaran dalam melakukan pembangunan/pengembangan pada obyek wisata di Kabupaten Pangadaran, khususnya di Kabupaten Pangadaran selalu bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat mencapai tujuan pembangunan secara maksimal. Selanjutnya dari kedua indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pangadaran sudah memiliki tujuan untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangadaran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangadaran Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA), dan dalam melakukan pembangunan/pengembangan pada obyek wisata di Kabupaten Pangadaran, khususnya di Kabupaten Pangadaran selalu bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat mencapai tujuan pembangunan secara maksimal.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (2016:29) menyatakan bahwa: "Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut". Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas menunjukan bahwa suatu strategi pengembangan apabila ingin berhasil secara maksimal maka harus memiliki tujuan capaian yang jelas terlebih dahulu untuk dapat direalisasikan oleh organisasi terkait yang mana hasil akhir dari pengembangan adalah menghasilkan suatu produk yang unggul.

Sudah selayaknya sebuah badan, organisasi, memiliki tujuan yang disepakati bersama dengan anggotanya, serta semua anggota yang terlibat berusaha menggapai tujuan tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan pula, apalagi ini kaitannya dengan pemerintahan sebagai pelayan publik, yang pastinya harus transparan kepada masyarakat, masyarakat juga ingin mengetahui pasti mengenai tujuan dilaksanakannya pembangunan/pengembangan pariwisata. Adapun hambatan yang berkaitan dengan dimensi tujuan yaitu pada indikator bekerjasama dengan instansi lain adalah lamanya proses koordinasi dengan instansi lain, karena harus melalui

proses pengkajian terlebih dahulu dari instansi terkait yang memakan waktu yang cukup lama sehingga proses realisasi menjadi terhambat.

Berdasarkan hal itu tentunya semua jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah hendaknya mengutamakan atau memprioritaskan proses pengkajian dalam suatu program pengembangan yang sifatnya kerjasama dengan instansi lain agar proses tersebut tidak menuai kendala serta tidak lama menunggu. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan koordinasi dengan instansi lain adalah dengan memberikan batasan waktu yang jelas untuk proses koordinasi dan proses pengkajian dari dinas lain, agar semua tujuan program dapat segera terealisasi.

2. *Environments* (Lingkungan)

Lingkungan merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh, karena lingkungan merupakan hal yang paling strategis dalam pemanfaatan sumberdaya lokal, diharapkan pemerintah dinas pariwisata melibatkan lingkungan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan pembangunannya agar lingkungan dapat merasakan manfaat dari pengembangan/ pembangunan yang dilakukan. Pada bagian lingkungan ini terdapat 2 (dua) indikator di antaranya melibatkan masyarakat sekitar, dan adanya benefit bagi masyarakat sekitar, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dua indikator tersebut, maka peneliti sajikan hasil penelitian berikut ini.

a. Melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pengembangan obyek wisata

Dari hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dilibatkan dalam rencana pengembangan di Kabupaten Pangandaran, masyarakat sekitar obyek wisata dilibatkan dalam musyawarah guna untuk pengembangan dan pembangunan. Dari hasil studi dokumentasi terlihat bahwa baru-baru ini pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran melakukan musyawarah dengan masyarakat membahas mengenai perencanaan pembangunan obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat setempat sudah dilibatkan dalam pembangunan atau pengembangan, oleh pemerintah dinas pariwisata. Mereka dilibatkan dalam sesi musyawarah beserta pemerintah, semua aspirasi dari masyarakat ditampung terlebih dahulu untuk kemudian di kaji kembali oleh pemerintah.

b. Adanya benefit bagi masyarakat sekitar atas pengembangan yang dilakukan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa banyak benefit yang diterima masyarakat sekitar dari pengembangan atau pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran, masyarakat sekitar bisa berjualan, bisa juga mengelola lahan parkir kendaraan pengunjung, ataupun usaha lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengembangan kepariwisataan tentunya banyak manfaat yang mestinya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar, namun pada kenyataannya belum bisa di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan

diskusi lanjutan mengenai pemanfaatan fasilitas penunjang wisata, agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Adapun hambatan yang berkaitan dengan dimensi lingkungan yaitu pada indikator benefit yang diterima oleh masyarakat, sampai saat ini belum bisa memberikan benefit apa-apa untuk masyarakat sekitar, terutama untuk fasilitas pendukung yang baru selesai dibangun. Berdasarkan hal itu tentunya semua jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah hendaknya memikirkan bagaimana caranya untuk dapat secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama pelaku usaha, pelaku wisata atau UMKM. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan benefit bagi masyarakat yaitu dengan berdiskusi dengan masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas pendukung,

3. Direction (Pengarahan)

Pengarahan disini lebih kepada usaha dari seorang pemimpin dalam menggerakkan anggota-anggota kelompoknya sehingga mereka memiliki keinginan dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran organisasi, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) indikator dalam *directions*/pengarahan, yang pertama pengarahan dari pemda, kedua pengarahan bagi pelaksana teknis dilapangan untuk lebih jelasnya peneliti paparkan sebagai berikut.

a. Adanya pengarahan dari pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa setempat

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat berkaitan dengan program pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran, baik pada saat perencanaannya ataupun pada pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah dinas pariwisata Kabupaten Pangandaran beserta pemerintah desa setempat selalu melakukan koordinasi dan komunikasi, harus saling bersinergi dan bertukar pikiran dengan pemerintah desa, agar tercapai tujuan bersama.

b. Adanya pengarahan kepada pelaksana teknis dilapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata kabupaten Pangandaran ketika ada pekerjaan dilapangan, selalu memberikan pengarahan kepada pelaksana teknis sebelum berangkat ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dinas pariwisata kabupaten Pangandaran selalu memberikan arahan kepada pelaksana teknis dilapangan ketika sedang ada pekerjaan dilapangan. Dari hasil penelitian pada dimensi pengarahan bahwa pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran selalu melakukan koordinasi dan komunikasi, selalu memberikan arahan kepada pelaksana teknis dilapangan ketika sedang ada pekerjaan dilapangan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumarno (2012:538) mengemukakan bahwa: Pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dapat diartikan sebagai proses peralihan dari rencana tertulis menjadi sesuatu yang memiliki wujud, atau manfaat, yang tentunya harus berdasarkan pada temuan-temuan yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini peneliti memberikan analisa bahwa dalam sebuah program realisasi harus ada pelaksana teknis dilapangan yang mengetahui kejadian-kejadian di palangan, menjalankan fungsi *controlling*, dan pengamatan agar sesuai dengan perencanaan awal, sesuai dengan arahan atasan, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Actions (Tindakan)

Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur dimensi tindakan, pertama menilai sejauhmana pelaksanaan pengembangan di kawasan pantai Karapyak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, kedua sejauhmana pelaksanaan pengembangan ini sesuai dengan perencanaan awal, ketiga sejauhmana pelaksanaan pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis yang diperintahkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pemaparan sebagai berikut.

a. Pengembangan di Obyek Wisata Pantai Pangandaran Sudah Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa semua program pengembangan atau pembangunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dinas pariwisata kabupaten Pangandaran setiap melakukan kegiatan program pengembangan selalu mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa perencanaan awal sudah bisa dilaksanakan dengan baik, namun terkadang tidak sesuai dengan angka awal, banyak anggaran-anggaran yang tidak terduga. Baerasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa program pengembangan di kabupaten pangandaran sudah sesuai dengan perencanaan awal yang telah disusun, tercatat program pengembangan yang dilakukan pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 sudah bisa sesuai dengan perencanaan.

c. Pelaksana kebijakan melaksanakan pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang diperintahkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa pelaksana teknis dilapangan sudah mengikuti dan mematuhi apa yang

diinstruksikan oleh pimpinan dalam pengarahan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengembangan suatu obyek wisata harus bergerak ke arah yang lebih baik, dengan mengacu kepada apa yang telah tertulis dan direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dimensi *action* (tindakan) bahwa program pengembangan Kepariwisata di Kabupten Pangandaran sudah mengacu pada peraturan yang ada, program pengembangan di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan perencanaan awal yang telah disusun, pelaksana teknis dilapangan sudah mengikuti dan mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pimpinan dalam pengarahan.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasan, (2007:538) menyebutkan bahwa: Pengembangan secara etemologi yaitu berarti proses atau cara perbuatan mengembangkan, secara istilah pengembangan menunjukan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Dari hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengembangan Kepariwisata harus bergerak ke arah yang lebih baik, dengan mengacu kepada apa yang telah tertulis dan direncanakan sebelumnya. Dari pengamatan peneliti memberikan analisa bahwa yang harus di tekankan dalam tidakan dilapangan ketika mengimplementasikan sebuah program adalah bagaimana pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak melanggar hukum, mengenai kesesuaian pelaksanaan dilapangan dengan perencanaan awal, dan melaksanakan fungsi koordinasi.

5. Learning (Pembelajaran)

a. Adanya pemanfaatan fasilitas penunjang untuk Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan fasilitas penunjang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, pemerintah daerah harus bernegosiasi kembali dengan masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dinas pariwisata kabupaten Pangandaran belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar.

b. Adanya pemeliharaan asset pemerintah yang sudah dibangun

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan bahwa untuk pemeliharaan fasilitas taman belum ada, namun untuk keseluruhan ada 2 program pemeliharaan, yaitu pemeliharaan asset yang sudah di bangun oleh pemerintah daerah, dan pemanfaatan fasilitas yang dapat digunakan untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dari hasil penelitian pada dimensi pembelajaran bahwa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dinas pariwisata kabupaten Pangandaran belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat

sekitar, untuk anggaran pemeliharaan untuk kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran dinas pariwisata kabupaten Pangandaran sudah memiliki anggaran.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simamora (2014:287), mengemukakan bahwa: "Pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik". Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dilaksanakannya program pengembangan adalah untuk meningkatkan berbagai aspek, diataranya aspek obyek itu sendiri agar dapat menarik wisatawan, aspek lingkungan agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai peluang. Adapun hambatan yang berkaitan dengan dimensi pembelajaran yaitu pada indikator pemanfaatan fasilitas pendukung sampai saat ini belum bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, mereka belum bisa memanfaatkan fasilitas ruko yang disediakan pemerintah untuk para pelaku usaha, pelaku pariwisata serta UMKM.

Berdasarkan hal itu tentunya semua jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah hendaknya bisa memberikan manfaat dari fasilitas yang telah mereka bangun, pemerintah diharapkan dapat menganalisa dan melakukan pembelajaran mengenai kendala tersebut. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pemanfaatan fasilitas pendukung yang dibangun pemerintah adalah melakukan analisa, pembelajaran, dan evaluasi mengapa belum dilirik oleh masyarakat, setelah itu lalu melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait dengan pemanfaatan fasilitas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara bahwa Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal sesuai dengan teori Geof Mulgan (2009:4) yaitu: 1) Purposes (Tujuan), 2) Environments (Lingkungan), 3) Directions (Pengarahan), 4) Actions (Tindakan), 5) Learning (Pembelajaran). Dibuktikan dengan adanya indikator yang belum optimal diantaranya dengan ditemukannya hambatan-hambatan antara lain: dalam bekerjasama dengan instansi lain terkadang lama dalam proses pengkajian sehingga menyita waktu dalam proses administrasinya, fasilitas yang dibangun pemerintah belum bisa di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, selanjutnya pemerintah dinas pariwisata masih kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan calon investor, fasilitas yang dibangun oleh pemerintah belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memberikan jangka waktu untuk proses

pengkajian dari instansi lain, berupaya melakukan penawaran untuk para investor, berupaya bernegosiasi dengan masyarakat sekitar agar bisa memanfaatkan fasilitas untuk berjualan

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan pada setiap indicator adalah sebagai berikut: Dalam rangka mengoptimalkan strategi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran sebaiknya dinas pariwisata harus memberikan jangka waktu untuk proses pengkajian dari instansi lain agar dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sesuai dengan rencana. Upaya-upaya perbaikan yang diusulkan antara lain memberikan batasan waktu yang jelas untuk proses koordinasi, memberikan jangka waktu untuk proses pengkajian. Untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan dalam strategi pengembangan Kepariwisatan di Kabupaten Pangandaran pemerintah bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun berupa ruko tempat berjualan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton & Weber, Helmut. F. 2006, *Perencanaan Ekowisata: dari. Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Soegoto, Soeryanto Eddy. 2014. *Entrepreneurship : Menjadi Pebisnis Ulung*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Garratt, Bob. 2005. "Can Board of Directors Think Strategically? Some Issues in. Developing Direction-givers' Thinking to a Mega Level," Performance.
- Gayatri, G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi: Yogyakarta.
- Hardjana. 2011. *Komunikasi Interpersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta : Kanisum.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Public Strategy : Mobilizing power*.
- Nainggolan. 2008. *Strategi* . Bandung: Generasi Info Media.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Cetakan.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Simamora, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Assauri, S. 2016. " *Manajemen Operasi Produksi*". PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tjiptono, & Gregorius Chandra 2006, *Manajemen Pelayanan Jasa*,. Yogyakarta: Andi Offset.

Wijaya, T. 2011. *Manajemen Kualitas Jasa Edisi 1*. PT Indeks, Jakarta.

Zulham, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group,. Jakarta .